

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA PEMBANGUNAN/MODAL,  
DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi  
pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014)**

***THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, CAPITAL EXPENDITURE, AND  
INFLATION RATE TOWARDS REGIONAL TAX INCOME  
(Study case in Bandung municipality government in 2008-2014)***

**Dian Triastuti<sup>1</sup>, Dudi Pratomo<sup>2</sup>**

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>[diantriastuti@students.telkomuniversity.ac.id](mailto:diantriastuti@students.telkomuniversity.ac.id), <sup>2</sup>[dudipratomo@telkomuniversity.ac.id](mailto:dudipratomo@telkomuniversity.ac.id)

---

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier data panel, uji F untuk pengujian secara simultan dan uji t untuk pengujian secara parsial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2007-2014. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Belanja pembangunan/modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, Tingkat Inflasi, Penerimaan Pajak Daerah.

**ABSTRACT**

*This research aim to analyze the impact of economic growth, capital expenditure, and inflation rate towards tax income in Bandung Municipality Government in 2007-2014 period. panel regression, F test, and t test is used in this research to analyze the impact both partially and simultaneously.*

*The result shows that the impact simultaneously occurs in economic growth, capital expenditure, and inflation rate towards tax income in Bandung municipality government in 2007-2014. Meanwhile economic growth and inflation rate partially and significantly does not impact tax income. Capital expenditure partially and simultaneously impacts tax income.*

*Keywords: Economic Growth, Capital Expenditure, Inflation Rate, Regional Tax Income.*

**1. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan Produk domestik regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya digambarkan oleh pertumbuhan PDRB. PDRB telah menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak negara sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk, sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kita secara total bagus. Ini menunjukkan ekonomi Indonesia semakin baik sebetulnya karena biarpun sektor *tradeable*-nya turun tapi sektor *non-tradeable*-nya sangat baik (Fuad Rachmany: 2014). Sementara itu Tax Ratio Indonesia yang masih dibawah 13% sebagai negara *emerging market* dinilai masih terlalu kecil. Selanjutnya iya juga mengatakan idealnya tax ratio Indonesia bisa berada di angka 20% atau setidaknya 17% melihat pertumbuhan ekonomi negara (Tony Prasetyantono:2013). Tax ratio sendiri adalah perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam satu tahun dengan PDB (Safri Nurmantu,2005:35).

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat ([www.inspirasibangsa.com](http://www.inspirasibangsa.com)) laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tergolong tinggi, diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 8,62%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8%. "Tahun ini laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai lebih dari 9%, laju pertumbuhan ini juara dunia, Eropa saja nol koma sekian.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Modal (*capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja Modal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita (David dan Priyo, 2007)

Selain pertumbuhan ekonomi dan belanja pembangunan/ modal yang mempengaruhi penerimaan pajak, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, salah satunya adalah inflasi. inflasi sendiri merupakan proses kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus atau turunnya nilai uang yang terus menerus (Losina, Dhyah, 2008:25). Dirjen Pajak, Fuad Rahmany (2014) juga mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat (Fuad Rahmany:2014). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Vito Tanzi (1977) dimana Tingkat Inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan menurut David G and Bernard J (1977) mangatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi baik pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas tentang fenomena maka ditemukan dimana penerimaan pajak masih belum optimal, terjadinya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diindikasikan pendapatan pemerintah juga akan meningkat. Belanja pembangunan/ modal ikut mempengaruhi penerimaan pajak, Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, Inflasi juga mempengaruhi penerimaan pajak dimana tingkat inflasi yang rendah karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat. maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah."

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Penerimaan Pajak Daerah

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang – undang No.17 Tahun 2003 pasal 1 huruf 9 dan pasal 11 ayat 3 tentang Keuangan Negara, bahwa penerimaan negara adalah semua penerimaan kas yang masuk ke negara terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak serta hibah. Penerimaan pajak juga diklasifikasikan menjadi dua yaitu penerimaan pajak dari pusat dan penerimaan pajak dari daerah. Penerimaan pajak daerah adalah penerimaan kas yang masuk ke kas daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/ Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Joko Untoro (2010:39) “Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang”. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Definisi produk domestik regional bruto menurut Purnastuti dan Mustikawati (2008:119) “Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang di hasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional.”

### 2.3 Belanja Pembangunan Modal

Dalam Peraturan Pemerintah NO. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja modal ( *Capital Expenditure*) adalah, pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Definisi belanja modal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun digunakan dalam kegiatan pemerintah.

### 2.4 Inflasi

Menurut Sukirno (2010:14) Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun (Wijayanta dan Widyaningsih, 2007:112). Secara umum Inflasi adalah kenaikan harga – harga yang bersifat umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Dari definisi ini, kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harag pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat setelah masa lebaran, harga – harag dapat turun kembali.

### 3. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOSTESIS

#### 3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak Menurut Nurcholis Hanif (2005:177) Jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat. Hal ini meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat. Dalam penelitian Ari Dwi Wulandari (2009) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan terhadap Penerimaan Pajak. Dan penelitian Rahman Kadir (2013) menyebutkan bahwa Belanja Modal berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

#### 3.2 Belanja Pembangunan/ Modal dan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu alat pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seperti pembangunan daerah. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita (David dan Priyo, 2007). Jhon Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Rahman Kadir (2013) menyatakan Belanja Modal berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

#### 3.3 Tingkat Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah

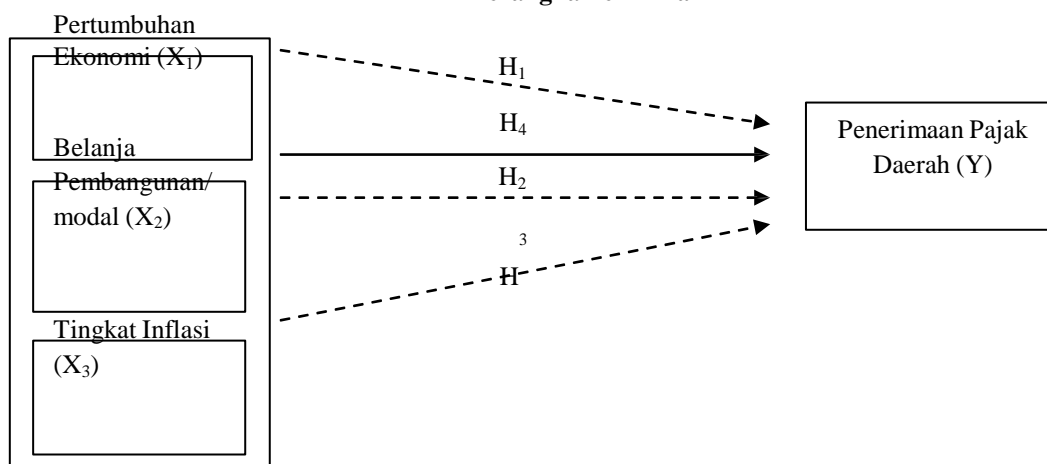
Hubungan Inflasi dengan Penerimaan pajak berbanding terbalik. Terdapat perbedaan antara pengetahuan ekonomi sisi pemerintahan dengan sisi ekonomi penawaran antara inflasi dengan pajak. apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat akan mengalami perubahan, yang berdampak pada penerimaan pajak (Rosyidi, 2002:119). Dalam penelitian Encep Herdiana (2013) menyatakan Tingkat Inflasi berhubungan negatif terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian Sherley Angelia (2014) menjelaskan bahwa Tingkat Inflasi berhubungan negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

#### 3.4 Hipotesis Penelitian

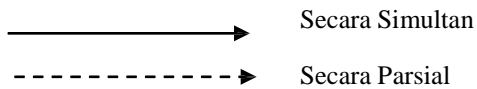
- $H_1$  : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- $H_2$  : Belanja Pembangunan/ Modal berpengaruh positif secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- $H_3$  : Tingkat Inflasi berpengaruh negatif secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- $H_4$  : Penerimaan Pajak Daerah, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Gambar 2.1

#### Kerangka Pemikiran



Keterangan :



#### 4. METODE PENELITIAN

##### 4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah data perekonomian yang diperoleh dari Laporan Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha dan Laporan Tingkat Inflasi Kota Bandung selain itu Data Penerimaan Pajak yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Daerah dan Data Belanja Pembangunan/ Modal diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

##### 4.2 Variabel Operasional

Tabel 2

Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<b>Variabel Independen</b>			
1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan Ekonomi adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam kawasan Kota Bandung.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Bandung	Rasio
2. Belanja Pembangunan/ Modal (X2)	Belanja pembangunan/modal adalah semua bentuk pengeluaran kas oleh pemerintah dalam pengadaan barang modal atau aktiva tetap yang memiliki masa ekonomis lebih dari 1 tahun.	Berasal dari jumlah pengeluaran Belanja Pembangunan/ Modal Provinsi Jawa Barat	Rasio
3. Tingkat Inflasi (X3)	Tingkat Inflasi adalah meningkatnya harga-harga umum secara terus-menerus, dan juga proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.	Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Bandung	Rasio
<b>Variabel Dependen</b>			
4. Penerimaan Pajak (Y1)	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009).	Berasal dari jumlah penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung	Rasio

Sumber: Data sekunder diolah penulis

##### 4.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali 2011:95). Secara khusus, untuk data yang tidak tersedia dalam bentuk kuartalan dilakukan interpolasi data. Dilakukannya interpolasi adalah karena keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan metode interpolasi linier dari data tahunan

menjadi data kuartalan yang dikembangkan oleh Insukindro dalam (Muraddani, 2007). Rumus interpolasi linier yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 1/4 \{Y_t - 4,6/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Y_{it} = 1/4 \{Y_t - 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Y_{it} = 1/4 \{Y_t + 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Y_{it} = 1/4 \{Y_t + 4,6/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

Dimana:

$Y_{it}$  = Data pada kuartal ke-i dan tahun ke-t

$Y_t$  = Data pada tahun ke-t

$Y_{t-1}$  = Data pada tahun sebelumnya

$I$  = 1,2,3,4

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Tabachnick, 1996 dalam Ghazali, 2011:95). Regresi dapat dilakukan setelah melewati uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

$Y$  = Penerimaan Pajak Daerah

$X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_2$  = Belanja Pembangunan/Modal

$X_3$  = Tingkat Inflasi

$e$  = *Standard error*

## 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

	Y	X3	X2	X1
Mean	8.109805	1.064375	11.02721	4.730311
Maximum	39.89583	5.810000	66.64270	9.620373
Minimum	-3.645867	-0.490000	-6.100772	3.218435
Std. Dev.	9.275175	1.233665	16.00533	1.417463

Sumber: *Output SPSS 22 (2015)*

Analisis Statistik untuk Variabel Berskala Rasio

- Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai tertinggi sebesar 9.620373% dan terendah sebesar 3.218435% dengan rata-rata sebesar 4.730311% dan standar deviasi sebesar 1.417463%.
- Belanja Pembangunan/ Modal memiliki nilai tertinggi sebesar 66.64270% dan terendah sebesar -6.100772% dengan rata-rata sebesar 11.02721% dan standar deviasi sebesar 16.00533%.
- Tingkat Inflasi memiliki nilai tertinggi 5.810000% dan terendah sebesar -0.490000% dengan rata-rata sebesar 1.064375% dan standar deviasi sebesar 1.233665%
- Penerimaan Pajak memiliki nilai tertinggi 39.89583% dan terendah sebesar -3.645867% dengan rata-rata sebesar 8.109805% dan standar deviasi sebesar 9.275175%.

## 5.2 Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas maka besarnya nilai Jarque-Bera sebesar 1,600610 dengan tingkat Probability 0,449192. Tingkat Probability yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Sehingga  $0,449192 > 0,05$  dan nilai Jarque-Bera lebih kecil dari *Chi Square* tabel yang didapat yaitu  $1,600610 < 7,815$ , artinya data berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dapat dilihat pada lampiran 1.

### 2) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas diperoleh bahwa nilai Prob.F sebesar 0,0526. Dapat diartikan bahwa residual model ini bersifat homoskedastisitas sehingga bisa dikatakan memenuhi asumsi. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Dapat dilihat pada lampiran 2.

### 3) Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi diperoleh nilai Prob.Chi-Square lebih besar dari nilai signifikansi ( $\alpha$ ) yaitu nilai Prob.Chi-Square sebesar  $0,0675 > 0,05$  nilai signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan memenuhi asumsi Non-Autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi. Dapat dilihat pada lampiran 3.

### 4) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai Centered Variance Inflating Factor (VIF) pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,084484, variabel belanja pembangunan/ modal sebesar 1,223252, dan variabel tingkat inflasi sebesar 1,166335 dimana angka yang diperoleh tersebut kurang dari 10. Maka dalam pengujian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sehingga tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dapat dilihat pada lampiran 4.

## 5.3 Pembahasan

Untuk melihat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilakukan dengan pendekatan analisis regresi linear berganda dengan cara meregresikan jumlah masing-masing variabel bebas. Rekapitulasi hasil analisis regresi linear berganda Pertumbuhan Ekonomi (X1), Belanja Pembangunan/ Modal (X2), dan Tingkat Inflasi (X3) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,132360 + 0,432222 X_1 + 0,482020 X_2 - 1,742806 X_3 + \varepsilon$$

Setelah model regresi diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui signifikansi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah baik secara simultan maupun parsial. Hasil pengujian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 5.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara simultan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah diperoleh nilai probabilitas (F-statistic)  $0,041262 < 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Dapat diartikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Sherley Angelia (2014) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. dan penelitian Ari Dwi Wulan Dari (2009) menyatakan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

### 5.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah, diperoleh nilai probabilitas (*p-value*) untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,4323 lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu  $0,4323 > 0,05$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen Pertumbuhan Ekonomi secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Daerah. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,432222

hasil uji t. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung dari tahun 2007-2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat, Penerimaan Pajak Daerah tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun untuk tahun 2007-2014. Berdasarkan data tersebut dan pengujian yang dilakukan, maka Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2007-2014. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Sherley Angelia (2014) menjelaskan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

### 5.3.3 Pengaruh Belanja Pembangunan/ modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pengaruh Belanja Pembangunan/ modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah, diperoleh nilai probabilitas (*p-value*) untuk variabel Belanja Pembangunan/ modal sebesar 0,0074 lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan,  $0,0074 < 0,05$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen Belanja Pembangunan/ modal secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Daerah. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.482020 hasil uji t. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel Belanja Pembangunan/ modal berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Belanja Pembangunan/ modal Kota Bandung dari tahun 2007-2014 mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Sejalan dengan meningkat dan menurunnya Belanja Pembangunan/ modal, pada Penerimaan Pajak Daerah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun untuk tahun 2007-2014. Berdasarkan data tersebut dan pengujian yang dilakukan, maka Pengaruh Belanja Pembangunan/ modal tidak berpengaruh signifikan secara terhadap Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2007-2014.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Ari Dwi Wulan Dari (2009) menyatakan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan Rahman Kadir (2013) menyebutkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

### 5.3.4 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah, diperoleh nilai probabilitas (*p-value*) untuk variabel Tingkat Inflasi sebesar 0.0530 lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu  $0.0530 > 0,05$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen Tingkat Inflasi secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Daerah. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sebesar -1.742806 hasil uji t. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Tingkat Inflasi Kota Bandung dari tahun 2007-2014 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Sejalan dengan Tingkat Inflasi yang berfluktuasi, Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung tetap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun untuk tahun 2007-2014. Berdasarkan data tersebut dan pengujian yang dilakukan, maka Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2007-2014. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Sherley Angelia (2014) menjelaskan bahwa secara parsial Tingkat Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ modal, dan Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial.
- 3) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Belanja Pembangunan/ modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial.
- 4) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat memperluas objek penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas dan memperluas periode waktu penelitian.



- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel atau mengganti dengan variabel yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.
- c. Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya dalam Penerimaan Pajak Daerah harus dilaksanakan secara terus-menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar Penerimaan Pajak Daerah tersebut terus meningkat melalui penggalan potensi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, Sherley. (2014). *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung*. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Maranatha. Bandung.
- Dwi Wulandari, Ari. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Fuad Rahmany, 2014, *Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp 1.099 Triliun*, Jakarta
- Fuad Rahmany, 2014, *Inflasi Melambat, Penerimaan Pajak Diyakini Lebih Baik Dari 2013*. Jakarta
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif, Nurcholis. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Kadir, Rahman. (2013). *Pengaruh Penduduk, PDRB, Pelanggan dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Paajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Losina Purnastuti, Rr. Indah M, 2008, *Siap Menghadapi Ujian Nasional 2009*. Jakarta: Grasindo
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1993). *Ekonomi Publik*, Edisi ke-3, Cetakan ke-1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Muchtholifah, (2010), *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan
- Naelendra, Encep Herdianan Rachman. (2013). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012)*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Wong, Jhon D. (2004). *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Jurnal of Public Bugeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816
- <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/12/23/pajak-orang-kaya-sebagai-penoling/>, diakses pada 23 Agustus 2015 pukul 16.49
- <http://jabar.bps.go.id/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 19:58
- <http://bandungkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 20:58

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Uji Normalitas**

**Uji Normalitas**

Series: Residuals	
Sample 2007Q1 2014Q4	
Observations 32	
Mean	1.03e-15
Median	-0.122998
Maximum	14.53572
Minimum	-11.25420
Std. Dev.	5.214764
Skewness	0.045842
Kurtosis	4.091811
Jarque-Bera	1.600610
Probability	0.449192

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*

**Lampiran 2. Uji Heteroskedastisitas**

**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.438077	Prob. F(9,22)	0.0526
Obs*R-squared	15.97913	Prob. Chi-Square(9)	0.0673
Scaled explained SS	24.79220	Prob. Chi-Square(9)	0.0032

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*

**Lampiran 3. Uji Autokorelasi**

**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.393728	Prob. F(3,25)	0.0023
Obs*R-squared	7.140753	Prob. Chi-Square(3)	0.0675

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*

**Lampiran 4. Uji Multikolinearitas**

**Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7.241014	3.191711	NA
X1	0.709458	1.807281	1.084484
X2	0.067060	2.319083	1.223252
X3	1.794705	2.062538	1.166335

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*

**Lampiran 5. Uji Koefisien Determinasi****Koefisien Determinasi**

R-squared	0.251286	Mean dependent var	7.869375
Adjusted R-squared	0.171067	S.D. dependent var	6.026660
S.E. of regression	5.487019	Akaike info criterion	6.359116
Sum squared resid	843.0066	Schwarz criterion	6.542333
Log likelihood	-97.74586	Hannan-Quinn criter.	6.419847
F-statistic	3.132486	Durbin-Watson stat	0.857468
Prob(F-statistic)	0.041262		

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*

**Lampiran 6. Uji F Simultan****Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

R-squared	0.251286	Mean dependent var	7.869375
Adjusted R-squared	0.171067	S.D. dependent var	6.026660
S.E. of regression	5.487019	Akaike info criterion	6.359116
Sum squared resid	843.0066	Schwarz criterion	6.542333
Log likelihood	-97.74586	Hannan-Quinn criter.	6.419847
F-statistic	3.132486	Durbin-Watson stat	0.857468
Prob(F-statistic)	0.041262		

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*

**Lampiran Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial****Uji Signifikansi Parameter Indikator (Uji Statistik t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.132360	1.732899	3.538787	0.0014
X1	0.432222	0.542421	0.796838	0.4323
X2	0.482020	0.166765	2.890415	0.0074
X3	-1.742806	0.862721	-2.020128	0.0530

Sumber: *Output Eviews8 (2015)*